

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib dan Filianty, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 UUJN Tetapi Dinyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali*, Yogyakarta, Bintang Pustaka Madani Yogyakarta, 2021;
- Angkasa, Nita, Wardani, Yulia Kusuma, Zulkarnain, dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Lampung, Laduny Alifatama, 2019.
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Hukum*, Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Darus, Luthfan Hadi, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Effendi, Tolib, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang, Setara Press, 2016.
- Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia Publishing, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata , Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 2002.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Sudirman. L, *Acara Peradilan Agama*, Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Martien, Dhoni , *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Mitra Ilmu, Makassar, 2023.
- Mohammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004,
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.

- Nurdewata, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Prakoso, Djoko, *Peradilan In Absensia Di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Prasetyo, Teguh. *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo, Nata Karya, 2017.
- Salim, H.S, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sibuea, Hotma P, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Jakarta, Krakatau Book, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya, Arkola, 2003.
- Solehoddin, *Praktik Peradilan Perdata Pegangan Untuk Peradilan Semu (Moot Court)*, Malang, Setara Press, 2008.
- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2010.
- Syauket Amalia, Al Adawiah Rabiah, dan Ferdiananto Andre, *Hukum Perlindungan Investor: Analisis Investasi Ilegal Binomo*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Tornado, Anang Shophan, *PRAPERADILAN Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Nusa Media, 2018.
- Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Publika Global Media, 2024.
- Wijayanta, Tata dan Firmansyah, Heri, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2011.
- Yasin, *Korelasi Peradilan Dengan Proses Penerapan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Bintang Semesta Media, 2021.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi), Makalah**

Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris". *Jurnal Lex Renaissance e* NO. 3, VOL. 5 (Juli 2020): 131. <https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle/123456789/32339/13.%20Ratna%20Madyastuti.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Mohammad, Nurung, "Proses Peradilan Pidana Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2005;

Nilu, Dara Mustika, Pengawasan Terhadap PPAT oleh Majelis Pembina dan Pengawasan Daerah Di Kota Padang, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2021;

Rindy, Acvionita, "Perbandingan Perlindungan Hukum Profesi antara Profesi Jabatan Notaris dengan Profesi Jabatan PPAT", *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2017.

#### **D. Internet**

Pengadilan Negeri Banda Aceh, "Tata Cara Pemeriksaan Persidangan", <https://pn-andaaceh.go.id/wp-content/uploads/TATA-CARA-PEMERIKSAAN-ADMINISTRASI-PERSIDANGAN.pdf> , (diakses 2 Januari 2025).

Aries Albert, Dampak Hukum Putusan Hakim yang Berdasarkan Pada Bukti Palsu, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dampak-hukum-putusan-hakim-yang-berdasarkan-pada-bukti-palsu-lt58ddaa2675aa7/> , (diakses pada 19 Januari 2025).